

Satgas Sambungan hal 1

pungli dianggap sebuah kewajaran dalam pelayanan publik. Tapi sejak adanya Saber Pungli semua itu bisa ditekan," ungkapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, Gerakan Saber Pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi sekaligus menyasar secara internal sesuai Perpres No 87 Tahun 2018 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ibaratnya untuk membersihkan rumah harus menggunakan sapu yang bersih dulu serta warisan budaya permisif harus ditinggal dan tanggalkan.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi sosialisasi upaya menuju Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota Bebas Pungli oleh Satgas Saber Pungli Pusat. Sudah menjadi tugas Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana (sarpras) baik di daerah maupun pusat," kata Sultan.

Sultan menyatakan, Satgas tentu sudah menandai objek-objek mana yang harus

diwaspadai, tanpa mereka sadar kalau sedang diawasi. Sebab kalau pengawasan dilakukan gegabah dikhawatirkan bisa terjadi perlambatan layanan dengan alasan mengikuti prosedur.

"Meski harus jujur kita akui, ini bukanlah hal yang mudah tapi tetap harus kita mulai dan gerakkan. Agar sebagai bangsa yang konon bermartabat, benar-benar bisa maju setaraf bangsa-bangsa lain yang penuh disiplin menjaga dengan tertib keadaban sosial budayanya," terangnya.

Gubernur DIY menegaskan, aparaturnya di lingkungan Pemda DIY harus memberikan layanan prima yang dijanjikan sesuai pakta integritas yang telah diikrarkan dan ditandatangani dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab.

"Mohon maaf, saya juga sering diam-diam mendengar keluhan adanya intervensi kebablasan dalam pemenangan tender dan pengawasan proyek pengadaan dengan cara mencari-cari kesalahan. Terhadap budaya laten ini pun kita juga harus mawas diri," tandas Sultan.

(Ria/Ira)-f

PTM Sambungan hal 1

Didik membantah adanya pemberitaan di sebuah media soal 41 klaster Covid-19 di lingkungan sekolah di DIY saat PTM. Jumlah tersebut perlu dilurukan, karena data tersebut merupakan data akumulasi sejak pandemi Covid-19 (sejak tahun 2020) jadi bukan disebabkan oleh PTM yang baru dilaksanakan akhir-akhir ini.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan terdapat empat miskonsepsi mengenai isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang saat ini beredar di masyarakat.

Miskonsepsi pertama adalah mengenai terjadinya klaster akibat PTM terbatas. "Angka 2,8% satuan pendidikan itu bukanlah data klaster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19. Sehingga, lebih dari 97% satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang pernah tertular Covid-19," ujar Direktur

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri di Jakarta, Jumat (24/9) petang.

Miskonsepsi kedua, belum tentu juga penularan Covid-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek.

Miskonsepsi ketiga, angka 2,8% satuan pendidikan yang diberitakan itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir. "Itu bukan berdasarkan laporan satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak tahun lalu yaitu bulan Juli 2020," ungkapnya.

Kemudian Miskonsepsi keempat adalah isu yang beredar mengenai 15.000 (lima belas ribu) siswa dan 7.000 (tujuh ribu) guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan.

(Ria/Ira/Ati)-d

Ditengok Sambungan hal 1

dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga menengok Butet di Warung Bu Ageng yang dikelola istrinya, Rulyani Isfihana.

Butet yang sudah dua kali menjalani

operasi saraf kejepit di tulang belakang, kini dalam proses pemulihan. "Proses recovery saraf-saraf yang kejepit, beradaptasi dengan tubuh. Kadang juga masih terasa sakit," ujar Butet yang menjalani

operasi di RS Mayapada, Tangerang, Banten, April dan pertengahan Juni. Oleh dokter, Butet disarankan sering belajar berjalan. Kalau rasa sakit dirasakan, segera bed rest.

(Ewp)-d

Amandemen Sambungan hal 1

satu ayat tentang kewenangan MPR membuat dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Juga untuk Pasal 23 dengan menambah satu ayat tentang kewenangan DPR untuk menolak dan mengembalikan RAPBN agar diperbaiki presiden jika tidak sesuai dengan PPHN.

Jika dibaca dalam nalar kenegaraan sebenarnya saat ini kita memerlukan haluan negara. Dalam sistem pemerintahan apa pun, garis besar haluan negara diperlukan agar visi besar bangsa dapat diwujudkan siapa pun pemimpin pemerintahannya. Maka, tugas pemimpin pemerintah tinggal mewujudkan misi dalam bentuk program konkret setiap 5 tahun.

Harus diakui, tanpa haluan negara sistem pembangunan pasca-Reformasi 1998 sangat bercorak presiden centris. Pembangunan nasional hanya disusun presiden melalui visi-misinya saat mencalonkan diri. Maka pembangunan nasional seolah bukan program rakyat, tapi kehendak politik presiden. Rakyat dianggap telah menyetujui program pembangunan nasional yang dicanangkan presiden.

Program pembangunan nasional tanpa panduan haluan negara akan cenderung mengarah pada orientasi politik dan ideologi partai politik pengusung presiden dan masa jabatan yang hanya lima tahun. Akibatnya, pembangunan nasional tidak

dapat berjalan berkesinambungan antara satu presiden dan penggantinya.

Itulah sebabnya amandemen terhadap Pasal 3 dan Pasal 23 UUD 1945 penting dilakukan. Karena untuk mewujudkan sistem pembangunan nasional bervisi kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan presiden dan parpol pengusungnya saat pilpres.

Meski demikian, rencana amandemen terbatas itu akan menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, pertama siapa yang menjamin bahwa agenda amandemen UUD 1945 itu hanya bersifat terbatas? Karena realitasnya dalam Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur amandemen tidak mengenal amandemen terbatas. Maka akan berpotensi konflik antara partai politik (parpol) untuk mengutak-atik pasal-pasal dalam UUD untuk diamandemen.

Pasal krusial seperti Pasal 6A Ayat (1) yang mengatur tentang presiden dan wakil presiden dipilih langsung rakyat. Pasal ini berpotensi diubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih MPR tujuannya untuk mensinkronisasikan dengan amandemen Pasal 3 UUD 1945 yang memberi wewenang MPR membuat dan menetapkan PPHN agar presiden dapat diberi sanksi pemakzulan (*impeachment*) oleh MPR ketika tidak dapat melaksanakan PPHN. Caranya mengubah presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat dan

mengembalikan supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Kedua, siapa pula yang menggaransi rencana amandemen UUD 1945 ini tidak akan menyentuh pasal krusial lainnya yaitu, Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang periodisasi jabatan presiden? Banyak kalangan berpendapat rencana amandemen UUD 1945 akan ada agenda terselubung untuk menambah periodisasi jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Karena presiden Jokowi dianggap berhasil dalam memimpin negara. Jika dilakukan pilpres kembali pada tahun 2024 dikhawatirkan akan mengalami polarisasi pilihan rakyat dalam dua kutub yang sulit didamaikan antara kubu nasionalis vs Islam.

Jika terhadap dua pasal krusial, yaitu Pasal 6A Ayat (1) dan Pasal 7 UUD 1945 dapat dijamin tidak akan diubah MPR, tidak menutup kemungkinan rencana amandemen kembali Pasal 3 dan Pasal 23 UUD 1945 dapat dilanjutkan. Tentu saja diperlukan konsensus (kesepakatan) antara anggota MPR terlebih dahulu. Dan diperlukan perluasan partisipasi publik dalam proses amandemen. Tujuannya agar proses amandemen UUD 1945 bukan merupakan isu elite melainkan isu publik karena terkait dengan masa depan bangsa. (*Penulis adalah Pengajar Fakultas Hukum dan Direktur LKBH FH Universitas Sebelas Maret.*)-f

Senin, Layani Warga Gunungkidul

VAKSINASI SEDULUR DAIHATSU YOGYAKARTA 2021

Senin, Layani Warga Gunungkidul

GUNUNGKIDUL (KR) - Untuk mendukung program Pemerintah dalam percepatan vaksinasi kepada masyarakat sekaligus HUT ke-76 SKH *Kedaulatan Rakyat*, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) bekerja sama dengan *KR* dan didukung Pura Pakualaman, Pemkab Gunungkidul, Komunitas Loro Blonyo PKK Gunungkidul, Dinas Kesehatan Gunungkidul, Polres Gunungkidul, Relawan Sonjo, dan Aksi Kami Foundation menggelar acara 'Vaksinasi Sedulur Daihatsu Yogyakarta 2021'. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya pegiat wisata, pelaku UMKM, pelajar, pegiat kreatif seni dan budaya serta komunitas Daihatsu di Yogyakarta.

Greg Sigit Suryanto, Kepala Cabang ADM Yogyakarta berharap, semakin banyak masyarakat yang dimudahkan mengakses vaksin sehingga kekebalan komunal segera terbentuk di DIY.

Kegiatan ini sebagai komitmen untuk mendukung Pemerintah dalam membantu percepatan vaksinasi. Ia berharap jika vaksinasi sudah 80 persen, kegiatan perekonomian segera bisa dibuka, mengingat selama pandemi Covid-19 belum bisa menggelar berbagai kegiatan.

Vaksinasi Sedulur Daihatsu Yogyakarta 2021 dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama September dan kedua Oktober berlokasi di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Sleman dan



KR-Istimewa

Mobil Vaksinasi Sedulur Daihatsu juga akan singgah di Rest Area Gubug Gedhe, Ngalang, Gedangsari.

Gunungkidul. Selain itu diselenggarakan vaksinasi keliling yang menyasar beberapa daerah di DIY yang belum terjangkau program vaksinasi. Target peserta 4.000 orang berusia 12-50 tahun.

Setelah digelar 9 September 2021 di Kampung Batik Giriloyo Bantul, Vaksinasi Sedulur Daihatsu Yogyakarta 2021 juga dilaksanakan di Kapanewon Galur, Kulonprogo (15 September), serta di Desa Wisata Cupuwatu II, Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Sleman (19 September). Sedangkan Senin (27/9) juga sebanyak 1.000 dosis vaksin akan diberikan untuk masyarakat di Desa Wisata Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, tepatnya di Rest Area Gubug Gedhe.

Untuk mengikuti vaksinasi, calon peserta bisa mendapatkan informasi melalui media sosial dan media komunitas, dengan mengisi pendaftaran melalui link: tinyurl.com/sedulurgunungkidul. Peserta akan mendapat QR Code via WA atau SMS untuk mengetahui jadwal vaksin sekaligus syarat memasuki area vaksin. Informasi lebih lanjut dapat klik www.daihatsu.co.id.

Sebelum masuk area preregistrasi, peserta wajib cek suhu dan cuci tangan, peserta akan diminta menunjukkan QR Code untuk masuk ke area registrasi sesuai arahan petugas. Kemudian peserta vaksin menuju meja registrasi, dan peserta harus menyerahkan data yang telah diberikan di bagian preregistrasi. **(Ded)-d**

Gantole Sambungan hal 1

kesempatan terbang selanjutnya," jelasnya.

Selain cabor gantole yang berlomba di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura atlet-atlet DIY dari cabor sepatu roda akan mulai tahapan latihan resmi di venue lintasan sepatu roda Bumi

Perkemahan Waena, Sabtu (25/9) pagi ini. Saat ini seluruh atlet dan pelatih sepatu roda DIY sudah berada di Kota Jayapura setelah tiba Jumat pagi.

Pelatih sepatu roda DIY, Sugeng Lasono mengatakan, kegiatan awal hari ini latihan resmi dan coba dimaksimalkan untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lintasan yang ada. "Sabtu dan Minggu kami diberikan kesempatan untuk coba lintasan, dan Senin perlombaan dimulai secara resmi," jelasnya.

Dari Kabupaten Mimika, atlet-atlet DIY cabor terbang layang kembali menjalani perlombaan untuk nomor *precision landing single seater* putra dan putri di Lapangan Udara TNI AU, Timika.

Pada hari kedua kemarin, hanya dua atlet DIY yakni Danang Tri Nugroho dan Erna Ervina Lona.

Menurut Ketua Kontingen DIY di Klaster Mimika, Topan Faisal Rizal, sebenarnya dalam kesempatan kemarin masih ada atlet DIY lain yang siap terbang, namun karena

kembali terhambat kondisi waktu, akhirnya diurungkan. "Besok Bu Lilis dan Mas Aris akan kembali terbang untuk kedua kalinya atau itu kesempatan terakhir mereka untuk menambah nilai," tegasnya.

Sementara untuk cabor panjat tebing, tiga atlet dan seorang pelatih sudah tiba di Mimika sejak Jumat pagi, namun baru latihan resmi Minggu (26/9) dan mulai lomba Senin (27/9). "Cabor panjat tebing, hari pertama melombakan nomor lead," terangnya. **(Hit)-d**

KPK Sambungan hal 1

Azis diketahui mangkir dari panggilan KPK terkait dugaan korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.

"Kami mengingatkan yang bersangkutan kooperatif, agar proses hukum penanganan perkara ini tidak berantarlurut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri. KPK, kemarin memanggil Azis. Namun, hingga sore, Azis tidak hadir.

KPK memang telah menerima surat dari Azis perihal permintaan penundaan jadwal pemeriksaan karena sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Dalam suratnya, Azis mengaku sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 beberapa waktu lalu.

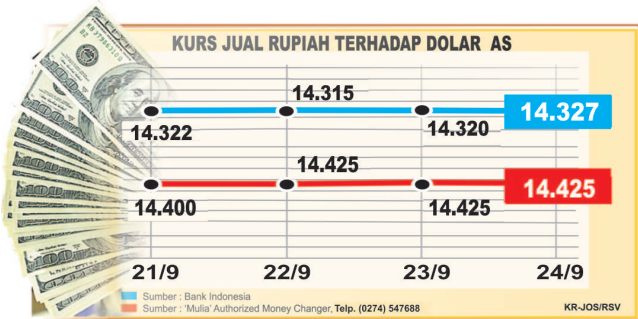
Ali menegaskan, KPK terus mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari para pihak yang terkait dengan kasus dugaan suap terkait dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Nama Azis Syamsuddin santer dikabarkan ikut terjerat

dalam kasus tersebut. KPK juga telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung.

Dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain, Azis selaku Wakil Ketua DPR dari Fraksi

Partai Golkar bersama dengan kader Partai Golkar lainnya, Aliza Gunado disebut memberikan suap Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta). Suap itu kepada Stepanus itu untuk mengurus kasus di Lampung Tengah.

(Ant/Obi)-d



Prakiraan Cuaca Sabtu, 25 September 2021					
Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C
Bantul					23-30
Sleman					21-30
Wates					23-30
Wonosari					23-30
Yogyakarta					23-30
Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal					70-95

Grafis : Arko



Zahrotus Sa'idah, S.I.Kom, M.A.
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

SEGALA hal yang berkaitan dengan artis memang selalu menjadi perhatian publik, baik dari hal kecil seperti outfit yang dikenakan sampai dengan momen-momen besar seperti pernikahan. Sebab itu banyak stasiun televisi yang menawarkan diri untuk menjadi penghubung antara artis dengan penggemarnya melalui serangkaian acara pernikahan artis yang ditayangkan secara live. Sejauh ini tayangan serangkaian

Roman Picisan Artis: Antara Komoditas dan Realitas

pernikahan artis memang sangat populer dan terbilang memiliki nilai komoditi. Jika kita melihat kebelakang memang acara tersebut rata-rata mendapatkan rating yang sangat tinggi, misalnya pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar mencapai rating 4.6 dengan total share 4.8 persen. Lalu ada juga pernikahan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina yang mencapai rating 5.8 dengan total share 27.8 persen. Dan ada juga pernikahan artis dengan capaian rating tertinggi yakni pernikahan Anang dan Ashanty yang mendapatkan rating 7.9 dengan jumlah share 30.1 persen (data dari berbagai macam sumber).

Adanya fenomena ini menimbulkan berbagai asumsi terkait esensi dan manfaat dari tayangan tersebut. Dari pihak stasiun televisi

berasumsi bahwa adanya tayangan tersebut secara tidak langsung dapat memberikan inspirasi dan edukasi masyarakat mengenai budaya terutama mengenai ritual adat yang dilakukan mempelai, baik sebelum akad sampai dengan resepsi pernikahan.

Berbeda dengan masyarakat yang kontra, secara umum mereka menyayangkan tayangan yang dinilai menghilangkan esensi kesakralan pernikahan. Pandangan tersebut disinyalir karena adanya temuan berupa gimmick yang mengerucut pada pembodohan publik. Tidak hanya itu saja, mereka juga menilai bahwa tayangan tersebut lebih condong menunjukkan sisi hedonis dibandingkan dengan sisi pengenalan adat. Sehingga mereka menganggap bahwa tayangan tersebut mencedera



kondisi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih banyak yang berada di lingkaran kemiskinan.

Asumsi dari pihak kontra ini mendapatkan sambutan hangat dari Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya surat peringatan dan sanksi yang ditujukan pada pihak penyelenggara. Namun sejauh ini sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi, seperti yang tertera dalam undang-undang pasal 36 dan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3-SPS). Berdasarkan pada feedback dari KPI tersebut kita dapat membayangkan berapa persen efek

'jera' yang didapatkan oleh pihak stasiun televisi. Karena itu tidak heran jika sampai saat ini masih banyak stasiun televisi yang menunjukkan schedule siaran prosesi pernikahan artis untuk beberapa waktu ke depan.

Secara etika, stasiun televisi harus memahami posisinya yang tidak hanya berperan sebagai penyaji, namun juga bertanggung jawab dengan apa yang disajikan. Penting untuk digarisbawahi bahwa tayangan tersebut umumnya terjadi selama kurang lebih tujuh jam (terhitung akad sampai dengan resepsi) dan tentunya jumlah tersebut belum termasuk kegiatan adat lainnya seperti siraman, Malam Bainai, Balacuiik Malapeh Bujang, dan masih banyak lagi lainnya. Artinya jika ditotal masyarakat disuguhi tayangan yang seharusnya sifatnya privasi ini kurang lebih tujuh

hari.

Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih banyak stasiun televisi yang kurang bijak dalam memilih antara komoditi (nilai jual artis) dengan realitas (kondisi sosial masyarakat). Jadi, jika disimpulkan rating tinggi tidak hanya karena kebutuhan tapi dikarenakan tidak adanya pilihan. Sebab realitas masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang berada di lingkaran kemiskinan, untuk itu adanya fenomena ini bisa menjadi catatan bagi calon praktisi di dunia broadcasting nanti agar dapat memberikan harapan baru terhadap tayangan-tayangan di pertelevisian Indonesia. (*)